

TANGGAPAN MASYARAKAT DESA TERPENCIL TERHADAP WAJIB BELAJAR 9 TAHUN (Studi Kasus Masyarakat Munti Gunung Kabupaten Karangasem)

NI LUH PUTU SUCIPTAWATI¹⁾, MADE ASIH¹⁾, NI NYOMAN SRI ARTINI²⁾

1) Dosen Jurusan Matematika Fakultas MIPA UNUD

2) PT Commonwealth Life

Email: putusuciptawati@yahoo.co.id

ABSTRACT

The 9 years compulsory education program purposes to give minimum education to the Indonesian citizen for developing their potency in order to live independently in their community or to continue their education to the higher education. This research aimed to know response of isolated Village Community towards 9 years compulsory education program and also the variables that influencing those responses. This research located at Munti Gunung Village The variables that identifies influencing the responses of Munti Gunung Village Community towards 9 years compulsory education program is analyzed through multinomial logistic regression method.

From 221 samples, 66,52 percent families support the program, 5,43 percent families are apathetic, and 28,05 percent families do not support the program of 9 years compulsory education program. The result that is analyzed by multinomial logistic regression method produces the best models:

- The apathetic statement that is compared with supported statement model.

$$g_1(\underline{x}) = -28,27236 + 22,45813x_1 - 0,00000896x_7 + 0,2349989x_2 - 1,90424x_3$$

- The unsupported statement that is compared with supporting statement model.

$$g_2(\underline{x}) = -9,427904 + 3,773763x_1 - 0,00000901x_7 + 0,2554591x_2 - 1,011138x_3$$

Based on the best models that are formed, the independent variables that significantly influencing the responses of the Munti Gunung Village Community towards 9 years compulsory education program are children's sex (x_1) and the age of the head of family (x_2), both of those variables are influencing positively, otherwise the head of family's education (x_3) and family's income (x_7) influencing negatively. The determination coefficient value that is formed based on the best model is 60, 57 percent.

Keywords: 9 years compulsory education program, the responses of community, multinomial logistic regression

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga akan bermakna strategis karena dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Partisipasi masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk memajukan pendidikan sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pihak yang menuntut pendidikan yang bermutu, tetapi juga berperan serta memberikan masukan pikiran, tenaga dan biaya bagi kemampuan pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia antara lain diberlakukannya wajib belajar pendidikan dasar (wajib

dikdas) sembilan tahun. Istilah yang digunakan adalah wajib belajar (compulsory education) bukan wajib sekolah, karena belajar itu wajib seumur hidup, sedangkan sekolah itu wajib sampai jenjang tertentu. Melalui penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut, diharapkan berdampak pada kualitas sumber daya manusia sehingga nantinya mampu menghadapi persaingan global. Fenomena bahwa anak-anak cenderung tidak bersekolah dan justru membantu orang tuanya mencari nafkah tercermin pada para gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis yang menyerbu sejumlah kota di Bali terutama di Kota Denpasar dan Badung sebagian besar berasal dari Dusun Munti Gunung. Dusun Munti Gunung adalah sebuah dusun yang terletak di Desa Tianyar, Kabupaten Karangasem yang masyarakatnya masih tergolong miskin di Provinsi Bali. Kemiskinan struktural telah terjadi di dusun ini. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang timbul akibat adanya suatu kekuatan yang berada di luar seseorang atau sekelompok orang yang membelenggu seperti misalnya kondisi geografis wilayah tempat tinggal yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah, yang

memaksa seseorang atau sekelompok orang tersebut agar tetap menjadi miskin (Arsyad, 1992 dalam Sembiring, 2009). Kurangnya pendidikan dan sikap mental yang lemah ikut serta mendukung perkembangan gelandangan dan pengemis pada saat ini.

Salah satu cara yang digunakan untuk memutus regenerasi kaum gelandangan dan pengemis yaitu dengan membenahi mental para gelandangan dan pengemis melalui pendidikan. Sasaran yang dituju bukan lagi para orang tua yang sudah terlanjur menganggap gelandangan dan pengemis sebagai satu-satunya jalan hidup, melainkan para anak-anak mulai dari usia dini. Agar mental gelandangan dan pengemis tidak tertular kepada anak-anak, sejak dini anak-anak harus mendapatkan pendidikan dasar, minimal menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun (Simabur, 2009).

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun yang digambarkan melalui pernyataan mendukung, apatis, atau tidak mendukung terhadap program tersebut. Variabel-variabel yang diidentifikasi memengaruhi tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun dianalisa dengan metode regresi logistik multinomial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tanggapan masyarakat di desa terpencil khususnya masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun serta variabel-variabel apa sajakah yang memengaruhi tanggapan masyarakat di desa terpencil terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun.

KAJIAN PUSTAKA

Wajib Belajar Sembilan Tahun

Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Pada tahun 1984 dicanangkan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun, dan setelah sepuluh tahun berjalan kembali dicanangkan oleh pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994 ditetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini berarti bahwa setiap anak Indonesia yang berumur 7 s.d. 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Dasar 9 Tahun sampai taPengertian wajib belajar menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia. Wajib belajar merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia yang berumur 7--15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun yaitu enam tahun di SD dan tiga tahun di SMP. Pelaksanaan program wajib belajar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah satu kebijakan yang mempresentasikan dukungan pemerintah terhadap pendidikan. Hannum dan Buchman (2005) dalam Ahmad (2009), berkeyakinan bahwa pendidikan memberikan kontribusi kepada perkembangan sosial, kesehatan, partisipasi dalam sektor ekonomi, dan demokrasi. Dengan demikian, wajib belajar tidak hanya menyangkut akses terhadap pendidikan dasar, tetapi pemerintah harus menjamin pendidikan yang disediakan adalah pendidikan yang berkualitas. Dampaknya, wajib belajar yang tidak disertai kualitas tidak menghasilkan *outcome* yang positif. Pendanaan merupakan salah satu persoalan dalam pemerataan akses pendidikan. Mengenai pendanaan program wajib belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dengan tegas menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan tingkat dasar sepenuhnya ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, salah satu kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemerataan akses pendidikan adalah melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang dikdas. Dengan adanya BOS diharapkan dapat memajukan usaha pemerataan akses pendidikan guna memutus mata rantai kemiskinan.

Indikator keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun adalah angka partisipasi siswa menjadi peserta didik. Program Wajib Belajar 9 Tahun dikatakan berhasil jika telah mencapai standar pelayanan minimal yaitu angka partisipasi murni (APM) tingkat SD sebesar 90 persen dan tingkat SMP sebesar 80 persen (Diknas, 2003 dalam Maryama, 2005). Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada tahun 2009 untuk provinsi Bali APM tingkat SD sebesar 94,82 persen, sedangkan APM tingkat SMP adalah 67,03 persen. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa APM tingkat SMP lebih rendah dari tingkat SD. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian anak/penduduk pada kelompok ini sudah tidak bersekolah lagi atau memang belum mengikuti pendidikan formal. Kemungkinan besar sebagian anak-anak yang telah menamatkan pendidikan SD tidak lagi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (belum menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun).

Menurut Beeby (1975) dalam Erhanudin (2009), penyebab terbesar anak Indonesia tidak bersekolah adalah kemiskinan, budaya orang tua, dan sekolah yang tidak menyenangkan. Faktor kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang sedang menjadi perhatian pemerintah dewasa ini, yang membuat banyak anak bangsa tidak dapat

bersekolah. Anak-anak cenderung membantu tanggungan hidup yang seharusnya dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Seharusnya, di usia muda anak-anak menuntut ilmu setinggi-tingginya agar kelak dapat memperbaiki status sosial ekonominya.

Penelitian Empiris yang Berkaitan dengan Wajib Belajar 9 Tahun

Penelitian yang berkaitan dengan pendidikan terutama program Wajib Belajar 9 Tahun telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa diantaranya yaitu penelitian Raharjo dan Suminam (1998) mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi dan demografi orang tua (pendidikan orang tua, pekerjaan, penghasilan, jumlah anak, dan akses media massa) sebagian besar sangat mendukung kelancaran kelanjutan anak untuk sekolah ke SMP. Selanjutnya, Maryama (2005) menyatakan bahwa variabel sosial ekonomi, yaitu jenis pekerjaan kepala keluarga dan variabel lain di luar variabel sosial ekonomi memengaruhi tingkat penerimaan kepala keluarga pada program Wajib Belajar 9 Tahun secara signifikan. Beberapa hasil penelitian memperjelas bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga sangat mendominasi dalam kelanjutan pendidikan anak, di samping juga beberapa alasan lainnya yang turut mendukung.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Pemilihan Dusun Munti Gunung sebagai tempat penelitian dilandasi pertimbangan karena banyak anak-anak yang berasal dari dusun tersebut menjadi pengemis, seperti banyak terlihat di tempat-tempat penyeberangan jalan di Kota Denpasar. Sesungguhnya mereka masih harus duduk di bangku sekolah mendapatkan pendidikan dasar. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mereka belum layak untuk bekerja.

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 tahun, maka yang menjadi objek penelitian adalah kepala keluarga siswa kelas V dan VI SD di Dusun Munti Gunung. Waktu penelitian selama dua bulan, yaitu pada bulan Juni dan Juli tahun 2010.

Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel respon. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin anak (X_1), umur kepala keluarga (X_2), pendidikan kepala keluarga (X_3), jenis pekerjaan kepala keluarga (X_4), jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan (X_5), jumlah anak yang masih sekolah (X_6), dan pendapatan keluarga (X_7). Variabel respon dalam

penelitian ini adalah tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun (Y).

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Tanggapan masyarakat di desa terpencil terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun adalah bagaimana masyarakat Dusun Munti Gunung menanggapi program Wajib Belajar 9 Tahun yang dalam penelitian ini diwakili oleh kepala keluarga dari siswa kelas V dan VI SD dalam bentuk pernyataan terhadap pendidikan anak. Kepala keluarga adalah orang yang menjadi kepala atau pemimpin dalam suatu keluarga yang bertanggung jawab atas anggota keluarga termasuk diri siswa terutama dalam hal biaya pendidikan.
- (2) Jenis kelamin anak, yaitu laki-laki dan perempuan.
- (3) Umur kepala keluarga dinyatakan dalam satuan tahun.
- (4) Pendidikan kepala keluarga adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang telah ditamatkan berdasarkan ijazah yang dimiliki oleh kepala keluarga.
- (5) Jenis pekerjaan kepala keluarga adalah jenis pekerjaan utama yang dilakukan oleh kepala keluarga.
- (6) Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan adalah banyaknya anggota keluarga yang masih ditanggung oleh kepala keluarga.
- (7) Jumlah anak masih sekolah adalah banyaknya anak yang masih sekolah dan menjadi tanggungan kepala keluarga.
- (8) Pendapatan keluarga adalah rata-rata pendapatan keluarga per bulan.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Munti Gunung. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu kepala keluarga dari siswa kelas V dan VI SD yang ada di Dusun Munti Gunung. Pemilihan sampel didasarkan pada metode *non probability sampling*, tepatnya metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu. Pertimbangan yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah karena siswa kelas V dan kelas VI SD berpotensi untuk melanjutkan pendidikan ke SMP (menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan mencakup data kuantitatif dan data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun, teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik multinomial

dengan bantuan *software* STATA version 9.0. Langkah-langkah dalam analisis regresi logistik multinomial secara umum sebagai berikut.

- (1) Mengelompokkan data responden;
- (2) Melakukan pengujian parameter secara simultan untuk mengetahui kecocokan model;
- (3) Melakukan pengujian parameter secara parsial untuk mengetahui variabel bebas yang paling berpengaruh dalam model;
- (4) Mencari model terbaik dengan metode *Stepwise* atau regresi logistik bertatar; dan
- (5) Melakukan interpretasi terhadap nilai rasio kecenderungan yang terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Dusun Munti Gunung

Dusun Munti Gunung merupakan sebuah dusun yang secara administratif terletak di Wilayah Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Dusun Munti Gunung mencakup 1.193 KK (Kepala Keluarga) pada tahun 2009. Mata pencaharian warga dusun secara mayoritas sebagai petani di lahan pertanian tadah hujan. Pemilikan lahan untuk bercocok tanam di kalangan petani Munti Gunung rata-rata relatif sempit yaitu kurang lebih antara 2 are sampai 4 are. Di lahan tadah hujan tersebut, petani menanam jagung, jambu mente, ketela pohon, ketela rambat, dan kacang-kacangan. Selain itu, juga di tanah tegalan tampak melambai-lambai beberapa pohon kelapa, sedangkan pada tebing-tebing dan jurang tampak tumbuh banyak pohon lontar (ental).

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 221 responden yang merupakan kepala keluarga dari siswa kelas V dan VI SD pada tahun ajaran 2009/2010 dan siswa kelas V pada tahun ajaran 2010/2011 di SDN 3 dan SDN 6 Tianyar Barat. Sebanyak 128 responden memiliki anak perempuan dan sebanyak 93 orang memiliki anak laki-laki. Berikut ini tabel tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun beserta alasan yang mendasari tanggapan tersebut.

Lampiran 1. Tanggapan Masyarakat Dusun Munti Gunung Terhadap Program Wajib Belajar 9 Tahun

Tanggapan	Responden (orang)	Persentase (%)
Mendukung	147	66,52
Apatis	12	5,43
Tidak Mendukung	62	28,05
Total	221	100,00

Sumber: Penelitian Data Primer

Lampiran 2. Alasan Kepala Keluarga Mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun

Alasan	Responden (orang)	Persentase (%)
Pendidikan itu penting	38	25,85
Bangga jika anak lulus SMP	11	7,48
Demi masa depan yang lebih baik	98	66,67
Total	147	100,00

Sumber: Penelitian Data Primer

Lampiran 3. Alasan Kepala Keluarga Apatis Terhadap Program Wajib Belajar 9 Tahun

Alasan	Responden (orang)	Persentase (%)
Banyak tanggungan	3	25
Terseher kemauan anak	9	75
Total	12	100

Sumber: Penelitian Data Primer

Lampiran 4. Alasan Kepala Keluarga Tidak Mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun

Alasan	Responden (orang)	Persentase (%)
Biaya sekolah yang mahal	35	56,45
Tamat SD anak harus membantu orang tua bekerja	19	30,65
Jarak rumah dengan sekolah jauh	5	8,06
Lainnya (menikah)	3	4,84
Total	62	100,00

Sumber: Penelitian Data Primer

Dalam penelitian ini, tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung dikelompokkan menjadi tiga yaitu mendukung, apatis, dan tidak mendukung. Sebanyak 147 orang kepala keluarga atau 66,52 persen dari 221 sampel yang diambil mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun (Lampiran 1). Sedangkan kepala keluarga yang menyatakan apatis terhadap program tersebut sebanyak 12 orang (5,43 persen) dan sisanya sebanyak 62 orang (28,05 persen) menyatakan tidak mendukung. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Dusun Munti Gunung telah mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun.

Tanggapan masyarakat tentu saja didasari oleh beberapa alasan-alasan tertentu. Adapun alasan yang mendasari masyarakat mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun yaitu karena pendidikan itu penting, bangga memiliki anak yang lulus SMP, dan demi masa depan yang lebih baik. Dari sejumlah sampel yang diambil, sebanyak 66,67 persen (98 responden) menyatakan mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun demi masa depan yang lebih baik (Lampiran 2). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui pendidikan diharapkan si anak nantinya memiliki masa depan yang lebih baik di kemudian hari.

Alasan yang mendasari kepala keluarga untuk apatis terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun diantaranya karena kepala keluarga memiliki banyak tanggungan baik tanggungan anggota keluarga maupun tanggungan anak yang masih sekolah. Alasan lainnya yaitu keputusan diserahkan pada si anak (terseher kemauan si anak) mau melanjutkan ke jenjang SMP atau tidak. Sebanyak 3 responden menyatakan apatis terhadap program tersebut karena alasan memiliki banyak tanggungan dan sebanyak 9 responden dengan alasan bahwa keputusan disesuaikan dengan kemauan anak (Lampiran 3).

Untuk tanggapan tidak mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun, alasan yang mendasari yaitu karena biaya sekolah yang mahal, tamat SD anak harus membantu orang tua bekerja, dan jarak rumah dengan sekolah

jauh. Alasan lainnya yaitu kepala keluarga menginginkan anaknya untuk menikah setelah tamat SD terutama untuk anak perempuan. Sebagian besar kepala keluarga tidak mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun dengan alasan bahwa biaya sekolah yang mahal yaitu sebanyak 35 responden. 19 responden dengan alasan bahwa setelah tamat SD anak harus membantu orang tua bekerja, 5 responden dengan alasan bahwa jarak rumah dengan sekolah jauh, dan 3 responden dengan alasan lainnya yaitu setelah tamat SD, anak akan menikah seperti yang dituturkan oleh salah satu kepala keluarga yang sempat ditemui di lapangan (Lampiran 4). Di sini tampak bahwa bagi sebagian masyarakat pedesaan pendidikan itu merupakan suatu hal yang mahal, sehingga mereka lebih memilih tidak menyekolahkan anak sampai tingkat SMP atau bahkan tidak sampai tamat SD.

Analisis Regresi Logistik Multinomial

Untuk mempertegas bahwa variabel-variabel seperti jenis kelamin anak, umur kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan pendapatan keluarga berpengaruh terhadap tanggapan kepala keluarga pada program Wajib Belajar 9 Tahun, dianalisis dengan menggunakan metode regresi logistik multinomial. Adapun yang menjadi dasar (*baseline*) dalam penelitian ini, yaitu tanggapan mendukung. Alasannya program Wajib Belajar 9 Tahun merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya ditunjang oleh adanya Dana BOS serta kebijakan lainnya yang bersifat meringankan biaya pendidikan dasar bagi peserta didik. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat akan mendukung kelanjutan pendidikan anak sampai dengan jenjang SMP atau yang lebih tinggi (menuntaskan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun), sehingga diperoleh model umum sebagai berikut.

Dengan bantuan *software* STATA 9.0, diperoleh model dugaan sebagai berikut.

Model dengan tanggapan apatis yang dibandingkan dengan tanggapan mendukung.

$$g_1(0) \text{ +++}$$

Model dengan tanggapan tidak mendukung yang dibandingkan dengan tanggapan mendukung.

$$g_2(0) \text{ +++}$$

Hal itu juga dapat dilihat hasil analisis untuk model penuh seperti dalam Tabel 1.

Pembentukan model penuh dengan melihat variabel-variabel yang memengaruhi tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun yang melibatkan tujuh variabel bebas menghasilkan nilai sebesar 0,6215 serta nilai $p = 0,0000$. Hipotesis yang diberikan adalah sebagai berikut.

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_{1,p} = b_2 = b_2 = \dots = b_{2,p} = 0$
(tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon)

$H_1 : \text{minimal ada satu} = 0$ (minimal ada satu variabel

Tabel 1. Hasil Analisis Model Penuh dengan Tanggapan Mendukung sebagai Baseline

Tanggapan	Koefisien	P > Z
Apatis		
Jenis kelamin anak (X_1)	22,34436	0,000
Umur kepala keluarga (X_2)	0,2521302	0,002
Pendidikan kepala keluarga (X_3)	-2,140666	0,004
Jenis pekerjaan kepala keluarga (X_4)	0,2788693	0,222
Jumlah anggota keluarga tanggungan (X_5)	-0,084125	0,803
Jumlah anak yang masih sekolah (X_6)	0,6887974	0,180
Pendapatan keluarga (X_7)	-0,00001	0,000
Konstanta	-29,85635	
Tidak mendukung		
Jenis kelamin anak (X_1)	4,080497	0,000
Umur kepala keluarga (X_2)	0,2615164	0,000
Pendidikan kepala keluarga (X_3)	-1,141253	0,010
Jenis pekerjaan kepala keluarga (X_4)	0,0691224	0,711
Jumlah anggota keluarga tanggungan (X_5)	-0,2351526	0,349
Jumlah anak yang masih sekolah (X_6)	0,5896057	0,145
Pendapatan keluarga (X_7)	-9,82	0,000
Konstanta	-9,57589	

Sumber : Hasil Analisis Data Primer

bebas yang memengaruhi variabel respon)

H_0 ditolak apabila nilai $p < .$ Dengan mengambil nilai sebesar 0,05 maka dalam penelitian ini, keputusan yang diambil yaitu tolak H_0 karena nilai $p < .$ Hal ini menunjukkan bahwa minimal ada satu variabel bebas yang memengaruhi variabel respon. Artinya, bahwa model tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun yang dipengaruhi oleh salah satu dari variabel bebas jenis kelamin anak (x_1), umur kepala keluarga (x_2), pendidikan kepala keluarga (x_3), jenis pekerjaan kepala keluarga (x_4), jumlah anggota keluarga tanggungan (x_5), jumlah anak yang masih sekolah (x_6), dan pendapatan keluarga (X_7) dapat diterima.

Tabel 1 juga dapat dilihat variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun. Untuk model pertama yaitu model yang membandingkan antara tanggapan apatis dengan tanggapan mendukung, maupun model kedua yaitu model yang membandingkan antara tanggapan tidak mendukung dengan tanggapan mendukung, variabel-variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan yaitu jenis kelamin anak (x_1), umur kepala keluarga (x_2), pendidikan kepala keluarga (x_3), dan pendapatan keluarga (x_7). Sebaliknya, variabel lain, seperti jenis pekerjaan kepala keluarga (x_4), jumlah anggota keluarga tanggungan (x_5), dan jumlah anak yang masih sekolah (x_6) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model penuh,

Pemilihan Model Terbaik Dengan Metode *Stepwise*

Metode *Stepwise* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencari model terbaik. Metode ini diawali dengan seleksi langkah maju dengan terlebih dahulu menentukan nilai p untuk menentukan variabel bebas mana yang masuk ke dalam model dan variabel

bebas mana yang keluar dari model. Dalam penelitian ini, nilai p untuk variabel bebas yang masuk diambil sebesar 0,15 dan untuk variabel bebas yang keluar sebesar 0,20 (Hosmer dan Lemeshow, 2000). Pemilihan variabel bebas untuk dimasukkan ke dalam model dengan melihat nilai p terkecil variabel bebas dalam model penuh. Dengan melihat nilai p untuk setiap variabel bebas, maka variabel bebas yang pertama diambil dengan nilai p terkecil yaitu variabel jenis kelamin anak (x_1). Adapun model terbaik yang diperoleh dengan menggunakan metode *Stepwise* dimana tanggapan mendukung sebagai dasar (*baseline*) ditunjukkan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Pembentukan Model Terbaik dengan Tanggapan Mendukung sebagai Baseline Menggunakan Metode Stepwise

Langkah	Model	Konstanta	Jenis kelamin anak (x_1)	Pendapatan keluarga (x_7)	Umur kepala keluarga (x_2)	Pendidikan kepala keluarga (x_3)	R ²
0	1	-2.5055					
	2	-0.8633					
1	1	-23.0315	21.4388				0.1958
	2	-2.8679	2.83341				
2	1	-20.0191	23.2281	-8.44e-06			0.4645
	2	0.7344	4.0946	-8.60e-06			
3	1	-30.2825	23.0551	-9.12e-06	0.23883		0.5642
	2	-10.5862	3.9834	-9.36e-06	0.2597		
4	1	-28.2723	22.4581	-8.96e-06	0.2349	-1.9042	0.6057
	2	-9.4279	3.7737	-9.01e-06	0.2554	-1.0111	

Sumber : Hasil Analisis Data Primer

Secara keseluruhan model terbaik yang terbentuk adalah sebagai berikut.

Model dengan tanggapan apatis yang dibandingkan dengan tanggapan mendukung.

$$g_1(\underline{x}) = -28,27236 + 22,45813x_1 - 0,00000896x_7 + 0,2349989x_2 - 1,90424x_3$$

Model dengan tanggapan tidak mendukung yang dibandingkan dengan tanggapan mendukung.

$$g_2(\underline{x}) = -9,427904 + 3,773763x_1 - 0,00000901x_7 + 0,2554591x_2 - 1,011138x_3$$

Model 1 dengan koefisien sebesar -28,27236 dengan nilai $\rho = 0,0816$ artinya, rasio antara tanggapan apatis dengan tanggapan mendukung adalah sebesar 0,0816.

Model 2 dengan koefisien sebesar -9,427904 dengan nilai $\rho = 0,4218$ artinya, rasio antara tanggapan tidak mendukung dengan tanggapan mendukung adalah sebesar 0,4218.

Model terbaik seperti dalam Tabel 26 memberikan gambaran bahwa variabel bebas yang masuk ke dalam model yaitu jenis kelamin anak (x_1), pendapatan keluarga (x_7), umur kepala keluarga (x_2), dan pendidikan kepala keluarga (x_3) dengan nilai R² sebesar 0,6057. Artinya, model yang diperoleh mampu menjelaskan tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun sebesar 60,57 persen. Variabel jenis kelamin anak merupakan variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap tanggapan masyarakat Dusun

Munti Gunung pada program Wajib Belajar 9 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Bali, khususnya di desa-desa terpencil masih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki, tidak terlepas dari sosial budaya masyarakat Bali yang patrilineal menganggap anak laki-laki adalah *purusa*/penerus generasi keluarga.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun dikelompokkan menjadi tiga yaitu tanggapan mendukung, apatis, dan tidak mendukung terhadap program tersebut. Dari 221 sampel yang diambil, sebanyak 66,52 persen menyatakan mendukung, 5,43 persen apatis, dan 28,05 persen tidak mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Berdasarkan model terbaik yang terbentuk, variabel bebas yang berpengaruh secara nyata pada tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap Program Wajib Belajar 9 Tahun yaitu variabel jenis kelamin anak (x_1) dan umur kepala keluarga (x_2) berpengaruh secara positif, serta variabel pendidikan kepala keluarga (x_3) dan pendapatan keluarga (x_7) berpengaruh secara negatif.
3. Nilai koefisien determinasi yang terbentuk dari model terbaik sebesar 60,57 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diidentifikasi memengaruhi tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap Program Wajib Belajar 9 Tahun belum cukup menjelaskan tanggapan masyarakat. Kemungkinan, terdapat variabel lain di luar variabel-variabel tersebut yang memengaruhi tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap Program Wajib Belajar 9 Tahun, atau variabel bebas yang pengaruhnya terhadap respon tidaklah linier.
4. Dari *odds ratio* (nilai kecenderungan) yang terbentuk, memberikan gambaran bahwa seorang kepala keluarga yang memiliki anak dengan jenis kelamin laki-laki cenderung mendukung anaknya untuk menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun. Selain itu, jika dilihat dari sisi umur, semakin tua umur seorang kepala keluarga, maka cenderung dia tidak mendukung anaknya untuk menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkannya, sehingga dilihat dari sisi pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang kepala keluarga, cenderung untuk mendukung anaknya dalam menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun. Di samping dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tanggapan masyarakat juga dipengaruhi

oleh besarnya pendapatan keluarga, sehingga jika dilihat dari besarnya pendapatan keluarga, semakin besar pendapatan keluarga, seorang kepala keluarga cenderung mendukung anaknya untuk menuntaskan program Wajib Belajar 9 Tahun.

Saran

Saran yang dapat disampaikan untuk tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 60,75 persen menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib belajar 9 Tahun sebesar 60,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya kajian atau penelitian berikutnya dengan memasukkan variabel bebas lainnya, seperti akses terhadap media masa atau ada kemungkinan variabel-variabel bebas yang diamati dalam penelitian ini pengaruhnya terhadap variabel respon tidaklah linier.
2. Variabel bebas yang paling berpengaruh dalam model tanggapan masyarakat Dusun Munti Gunung terhadap program Wajib belajar 9 Tahun, yaitu jenis kelamin anak, sehingga perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat dari pihak terkait mengenai peran *gender*. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya kesenjangan *gender*.
3. Berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam menanggapi program Wajib Belajar 9 Tahun dalam tanggapan tidak mendukung terhadap program tersebut, terlihat jelas alasan yang mendominasi tanggapan untuk tidak mendukung, yaitu karena biaya pendidikan yang mahal. Melalui penelitian ini diharapkan pihak-pihak terkait dengan pendidikan terutama yang berkaitan dengan Wajib Belajar 9 Tahun dapat mengaktifkan penggunaan dana BOS guna memperingan biaya pendidikan dasar terutama untuk masyarakat miskin. Dengan demikian, nantinya diharapkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat Dusun Munti Gunung mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, A. 1990. *Categorical Data Analysis*. New Jersey :John Wiley & Sons, Inc.
- Ali, M. 2010. *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun*. Online. (<http://m-ali-net/?p=73>. Diakses tanggal 21 Juli 2011).
- Anonim. 2004. *Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Online. (<http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>. diakses tanggal 2 Februari 2010).
- Badan Pusat Statistik Bali. 2007. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, dan Distribusi Pendapatan Bali 2007*. Denpasar : BPS
- Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. 2001. *Penilaian Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar*. Jakarta : BPPN.
- Erhanudin. 2009. *Pendidikan Gratis : Amanat yang Terlupakan*. Online (www.erhan-math.page.tl. diakses tanggal 30 Juni 2010)
- Hosmer, D.W and Lemeshow, S. 2000. *Applied Logistic Regression*. Second Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Juhaidi, A. (2009). *Wajib Belajar dan Investasi Pendidikan*. Online (<http://ahmad-juhaidi.blogspot.com/2009/05/wajib-belajar-dan-investasi-pendidikan.html>.diakses tanggal 26 Juni 2010)
- Maryama, A. 2005. *Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Penerimaan Kepala Keluarga Pada Program Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kasus Pada Kepala Keluarga Siswa Kelas V dan VI SD Negeri di Desa Sambirejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)*. *Skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Neter, J., Wasserman W. and M. H. Kutner. 1997. *Model Linear Terapan* Buku II. Diterjemahkan oleh Bambang Sumantri. Jurusan Statistika FMIPA IPB.
- Sembiring, K. 2009. *Hubungan Tingkat Pendapatan orang Tua Terhadap Pendidikan Anak di Kecamatan Berastagi*. *Skripsi* Online. Universitas Sumatera Utara. Medan. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14107/1/09E02114.pdf>. diakses tanggal 29 April 2010)
- Simabur, C.A. 2009. *Memutus Regenerasi Baru Melalui Pendidikan*. Online (<http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=131679>.diakses tanggal 2 Februari 2010)

ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN TINGKAT UPAH RIIL DI INDONESIA TAHUN 1992--2010 (PENDEKATAN *SIMULTANEOUS REGRESSION*)

NI LUH PUTU DEWI KUSUMAWATI
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

ABSTRACT

The aim of this research was to know the effect of real wages rates, gross domestic product, physical investment, and price changes both simultaneously or partially toward the labor absorption and also to know the effect of labor absorption, minimum wages, and education level both simultaneously or partially toward the level of real wages in Indonesia.

The result showed that the variables of labor absorption, minimum wages, and education level simultaneously affected the rates of real wages in Indonesia significantly. The variables of labor absorption and minimum wages partially found affected the real wages rates positively and significantly, whilst the variable of education level partially affected the real wages rates in Indonesia negatively and significantly. On the structural equation of labor absorption, variable of real wages rates, GDP, physical investment, and price changes simultaneously affected significantly the labor absorption in Indonesia. The variables of real wage rates, GDP, and price changes partially found affected the labor absorption positively and significantly whereas the variable of physical investment partially had no effect toward the labor absorption in Indonesia.

Key words: labor absorption, real wages rate, minimum wage.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan tersebut ditandai dengan jumlah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Salah satu yang diduga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi yang merupakan perkembangan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Hukum Okun atau *Okun's Law*. *Okun's Law* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, yang terjadi di Indonesia adalah adanya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin tinggi di tengah pertumbuhan yang semakin membaik (Bank Indonesia, 2006).

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan hal yang menggembirakan, tetapi berbagai masalah belum bisa teratasi. Tingkat pengangguran dari tahun 1998-2004 memperlihatkan kecenderungan meningkat, bahkan pada tahun 2005 tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 11,24 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari tingkat pengangguran normal sebesar empat persen (Dimas dan Nenek, 2009). Selain masalah tingginya tingkat pengangguran, Indonesia juga dihadapkan dengan permasalahan di bidang pengupahan. Masalah pertama yang dapat timbul dalam bidang

pengupahan adalah bahwa pengusaha dan karyawan pada umumnya mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah.

Masalah selanjutnya adalah rendahnya tingkat upah dan pendapatan masyarakat. Banyak karyawan yang berpenghasilan rendah, bahkan lebih rendah dari kebutuhan hidup minimumnya. Rendahnya tingkat upah bisa disebabkan oleh dua hal yaitu, rendahnya tingkat kemampuan manajemen pengusaha dan rendahnya produktivitas kerja.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah tingkat upah riil, Produk Domestik Bruto, investasi fisik, dan perubahan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Apakah tingkat upah riil, Produk Domestik Bruto, investasi fisik, dan perubahan harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Apakah penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah riil di Indonesia?
4. Apakah penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah riil di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat upah riil, Produk Domestik Bruto, investasi fisik, dan perubahan harga secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat upah riil, Produk Domestik Bruto, investasi fisik, dan perubahan harga secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap tingkat upah riil di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara parsial terhadap tingkat upah riil di Indonesia.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan khususnya mengenai penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah riil.
2. Secara praktis hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah riil di Indonesia secara lebih kompleks.

KAJIAN PUSTAKA

Penyerapan Tenaga Kerja

Simanjuntak (2001) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga, dengan batasan umur 15 tahun. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Ananta (1990) dan Ignatia-Nachrowi (2004) yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah sebagian penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila terdapat permintaan terhadap barang dan jasa.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu (BPS, 2010), sedangkan seseorang dikatakan menganggur atau mencari pekerjaan apabila termasuk penduduk usia kerja yang (1) tidak bekerja, (2) sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, (3) sedang mempersiapkan usaha, (4) yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, dan (5) yang sudah memiliki pekerjaan tetapi

belum mulai bekerja. Pengertian dari penyerapan tenaga kerja dapat diartikan secara luas. Menyerap tenaga kerja berarti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha.

Tingkat Upah Riil

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Terdapat perbedaan mengenai pengertian upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat Upah Riil Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja

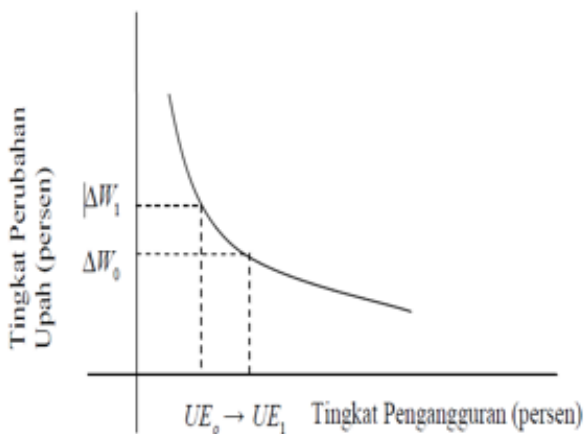
Perubahan tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya, banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akibat pengaruh turunnya skala produksi itu disebut juga sebagai efek skala produksi atau *scale effect*. Apabila upah naik (asumsi barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin tersebut disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect* (Sumarsono, 2003).

Di lain pihak, upah riil turun, produsen akan mau menambah tenaga kerja yang akan digunakan. Misalnya, jika harga jual barang yang diproduksi naik, produsen mau meningkatkan produksinya, yang dapat berarti meningkatkan permintaan tenaga kerja. peningkatan upah

riil bagi pekerja dapat meningkatkan daya beli pekerja itu sendiri. Adanya peningkatan daya beli masyarakat maka terdapat kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih banyak, sehingga permintaan akan barang dan jasa semakin besar. Untuk itu, perusahaan akan meningkatkan produksi barang dan jasanya. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan faktor produksi yang ada, salah satunya adalah tenaga kerja. Dengan demikian, semakin tinggi upah riil yang didapatkan pekerja juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan Tenaga Kerja Mempengaruhi Tingkat Upah Riil

Tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, jika penawaran lebih kecil daripada permintaannya maka tingkat upah akan cenderung naik. Hal ini juga sejalan dengan Kurva Philips. Philips menyatakan bahwa semakin kecil tingkat pengangguran (penyerapan tenaga kerja tinggi), maka semakin tinggi tingkat kenaikan upah.



Gambar 1. Kurva Philips

Selain tingkat upah riil, faktor yang diduga kuat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Produk Domestik Bruto, Investasi Fisik, dan Perubahan harga. Begitupula sebaliknya, variabel yang diduga kuat mempengaruhi tingkat upah riil selain penyerapan tenaga kerja adalah upah minimum dan tingkat pendidikan.

Menurut Okun (Wicaksono, 2010), Produk Domestik Bruto dengan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan positif atau dengan kata lain apabila terjadi kenaikan PDB, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Sebaliknya jika PDB mengalami penurunan, maka jumlah tenaga kerja juga ikut mengalami penurunan.

Menurut Sukirno (2005) investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu

masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Diantara komponen pertumbuhan ekonomi, investasi fisik yang memiliki pengaruh langsung terhadap daya serap tenaga kerja.

Selain menganalisis hubungan antara tingkat upah dan tingkat pengangguran, Philips juga meneliti tentang pengaruh perubahan harga dan pengangguran. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan tingkat pengangguran. Kurva Philips ini berlaku pada tingkat inflasi ringan, serta dalam jangka waktu yang singkat, sehingga dengan adanya kenaikan harga merangsang para pengusaha untuk meningkatkan produksi yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Apabila dalam perekonomian terjadi tingkat kenaikan harga yang sangat tinggi dan berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, maka Kurva Philips tidak berlaku lagi karena dengan kenaikan harga akan menjadikan daya beli masyarakat akan menurun sehingga akan menurunkan permintaan agregat yang akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja menurun.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU (2001), kenaikan upah minimum telah mendongkrak upah pekerja kasar dalam arti upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat upah riil pekerja. Begitu pula halnya dengan variabel tingkat pendidikan, juga terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat upah riil. Tingkat pendidikan merupakan salah satu variabel yang dapat mengukur *skill* pekerja disamping pengalaman kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja semakin tinggi pula upah atau gaji yang akan diterima oleh pekerja tersebut. Namun pengaruh tingkat pendidikan terhadap upah pekerja ini biasanya hanya akan terjadi pada lapangan kerja sektor formal (Sumarsono, 2003).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel endogen penyerapan tenaga kerja dan variabel endogen tingkat upah riil di Indonesia. Indonesia dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan Indonesia memiliki masalah penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah riil yang rendah. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat upah yang dirasakan para pekerja. Penelitian ini menggunakan data *time series* mulai tahun 1992 sampai tahun 2010.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data-data mengenai ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Endogen

- a. Penyerapan Tenaga Kerja (EMP), yang diindikasikan dengan jumlah Pekerja/buruh/karyawan yaitu jumlah orang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Yang termasuk dalam pekerja/buruh/karyawan yaitu jumlah penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian yang dinyatakan dalam satuan orang.
- b. Tingkat Upah Riil (WAGE), adalah upah yang diterima pekerja yang telah diperhitungkan dengan daya beli dari upah nominal yang diterima. Upah Riil dihitung dengan membagi nilai dari upah nominal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dikali 100. Tingkat Upah Riil dinyatakan dalam satuan rupiah.

2. Variabel Eksogen

- a. Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu nilai barang-barang dan jasa-jasa akhir yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
- b. Investasi Fisik yang dalam penelitian ini diindikasikan oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), yaitu nilai netto dari investasi yang besarnya didapatkan dari nilai investasi bruto (PMTB) dikurangi dengan stok. PMTDB mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. PMTDB dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK), adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan-perubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu. IHK dinyatakan dalam satuan poin.
- d. Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu tingkat upah terendah yang digunakan oleh pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai/karyawan/buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya yang dinyatakan dalam satuan rupiah.
- e. Tingkat Pendidikan (EDUC), di dalam penelitian ini akan digunakan jumlah pekerja/buruh/karyawan yang berpendidikan tinggi (SMA, Diploma I/II, Akademi/Diploma III, dan Universitas) dan dinyatakan dalam satuan orang.

Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan menggunakan Model Persamaan Simultan (*Simultaneous Regression*). Dalam regresi linear klasik, biasanya suatu variabel dependen Y dipengaruhi oleh satu atau

beberapa variabel independen X, namun dalam bidang ekonomi sering terjadi interdependensi, dimana bukan hanya X mempengaruhi Y, tapi Y juga mempengaruhi X, sehingga terjadi hubungan dua arah. Dalam keadaan dimana terdapat beberapa variabel yang saling pengaruh mempengaruhi inilah digunakan Model Persamaan Simultan (Gujarati, 2012).

Model Persamaan Simultan yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{LnWAGE}_t = \beta_{10} + \beta_{11} \text{LnEMP}_t + \beta_{12} \text{LnUMP}_t + \beta_{13} \text{LnEDUC}_t + \varepsilon_{1t}$$

$$\text{LnEMP}_t = \beta_{20} + \beta_{21} \text{LnWAGE}_t + \beta_{22} \text{LnPDB}_t + \beta_{23} \text{LnPMTDB}_t + \beta_{24} \text{LnIHK}_t + \varepsilon_{2t}$$

Keterangan:

WAGE	= rata-rata upah riil pekerja setiap bulan (rupiah)
EMP	= jumlah pekerja/buruh/karyawan (orang)
PDB	= Produk Domestik Bruto (miliar rupiah)
PMTDB	= Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto atas dasar harga konstan (miliar rupiah)
UMP	= rata-rata Upah Minimum Provinsi (rupiah)
EDUC	= jumlah pekerja berpendidikan tinggi (orang)
IHK	= Indeks Harga Konsumen (point)
t	= tahun ke-t
$\varepsilon_1, \varepsilon_2$	= residual

Identifikasi Persamaan Simultan

Suatu model dengan M persamaan simultan, akan *identified* apabila jumlah variabel eksogen yang tidak terdapat dalam persamaan harus paling sedikit atau sama dengan jumlah variabel endogen yang ada dalam persamaan dikurangi satu.

$$K - k \geq m - 1$$

Keterangan:

m	= jumlah variabel endogen dalam suatu persamaan
K	= adalah jumlah variabel eksogen dalam model
k	= jumlah variabel eksogen dalam suatu persamaan

Uji Simultanitas Hausman

Untuk melakukan pengujian simultanitas antara variabel endogen penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah riil, digunakan alat statistik *evIEWS 4.1*. Formula Hipotesisnya sebagai berikut.

$$H_0 : v = 0 \text{ (tidak terjadi simultanitas)}$$

$$H_1 : v \neq 0 \text{ (terjadi simultanitas)}$$

H_0 diterima apabila nilai probabilitas $WT \geq \alpha = 5$ persen

H_0 ditolak apabila nilai probabilitas $WT < \alpha = 5$ persen

Estimasi Model Persamaan Simultan

Oleh karena hasil dari identifikasi persamaan simultan menghasilkan persamaan yang *overidentified* maka metode yang digunakan adalah *Two Stage Least Square (2SLS)* yakni metode kuadrat terkecil dua tahap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia

Tren jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1980 terlihat terus meningkat. Dalam kurun waktu 30 tahun jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 147,5 juta jiwa menjadi 237,6 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami tren yang menurun dari sebesar 1,98% pada periode 1980-1990 menjadi 1,49% periode 2000--2010. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah angkatan kerja juga meningkat. Pada tahun 1992 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 78.399.935 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 57,33 persen, lalu mencapai 116.527.546 orang dengan TPAK sebesar 67,72 persen pada tahun 2010.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia terus mengalami peningkatan dari sebesar 2,71% pada tahun 1992 menjadi 9,89% pada tahun 2004, bahkan mencapai angka dua digit pada tahun 2005 yaitu sebesar 11,24%. Tahun 2006 barulah TPT Indonesia mengalami penurunan dari sebesar 10,28% menjadi sebesar 7,14% pada tahun 2010.

Persamaan Struktural Tingkat Upah Riil

Tabel 1.

Variabel	Koef.	SE	t-stat	Prob
C	-76,39	17,30	-4,42	0,0005
LnEMP	8,88	1,98	4,49	0,0004
LnUMP	0,41	0,18	2,24	0,0408
LnEDUC	-4,53	1,66	-2,74	0,0153
R-square	0,9125		F-stat	52,14
Adj.R2	0,8950		Prob(F-stat)	0,0000

Persamaan Struktural Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel	Koef.	SE	t-stat	Prob
C	9,19	0,93	9,91	0,0000
LnWage	0,06	0,03	2,29	0,0381
LnPDB	0,54	0,09	6,17	0,0000
LnPMTDB	0,02	0,02	0,89	0,3860
LnIHK	0,08	0,03	2,99	0,0096
R-square	0,9833		F-stat	205,99
Adj.R2	0,9785		Prob(F-stat)	0,0000

Dari persamaan struktural tingkat upah riil, terlihat bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penyerapan tenaga kerja dan upah minimum terhadap tingkat upah riil. Nilai koefisien variabel penyerapan tenaga kerja yang sebesar 8,88 berarti bahwa apabila penyerapan tenaga kerja naik sebesar 1 persen, maka tingkat upah riil akan meningkat sebesar 8,88 persen dengan asumsi variabel upah minimum dan tingkat pendidikan adalah konstan.

Dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang tinggi, pekerja akan memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang kuat di perusahaan sehingga tingkat upah riil

semakin meningkat. Begitu pula halnya dengan upah minimum, kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat upah riil pekerja sebesar 0,41 persen dengan asumsi variabel penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendidikan adalah konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh SMERU *Research Institute* pada periode 1988--2000, yaitu penelitian upah minimum juga signifikan meningkatkan tingkat upah riil terutama pada pekerja sektor formal.

Berbeda halnya dengan variabel tingkat pendidikan ditemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat upah riil, tapi tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat upah riil akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini tidak adanya kontrol lamanya bekerja dan juga data yang dipakai adalah upah yang diterima saat survei berlangsung, bukan upah pada saat pertama bekerja.

Jika dilihat dari persamaan struktural penyerapan tenaga kerja, terlihat bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan dari variabel tingkat upah riil, PDB, dan perubahan harga terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel investasi fisik tidak berpengaruh signifikan. Didasari atas teori *derived demand*, yaitu permintaan terhadap input produksi merupakan permintaan turunan dari permintaan atas output, permintaan tenaga kerja ditimbulkan akibat dari adanya permintaan konsumen akan barang dan jasa (Simanjuntak, 2001). Peningkatan upah riil bagi pekerja dapat meningkatkan daya beli pekerja, sehingga terdapat kecenderungan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih banyak, sehingga memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini diperkuat dengan komposisi PDB Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa untuk mengurangi pengangguran maka PDB riil harus tumbuh secepat PDB potensial. Dengan kata lain, dengan meningkatnya PDB maka akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja (Sukirno, 2005). Semakin tinggi PDB yang dihasilkan suatu negara merupakan salah satu indikator kesejahteraan negara tersebut. Pelaku usaha akan berusaha meningkatkan nilai tambah barangnya sehingga membutuhkan faktor-faktor produksi yang lebih besar lagi. Salah satu faktor produksi tersebut adalah tenaga kerja.

Begitu pula halnya dengan pengaruh variabel perubahan harga, berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan IHK sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,08 persen dengan asumsi tingkat upah riil, PDB, dan investasi fisik adalah konstan. Namun perlu kehati-hatian dalam mengatur kenaikan harga, maksudnya adalah tidak dengan serta merta jika harga dinaikkan setinggi-tingginya maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat tinggi. Kenaikan harga yang tinggi yang tercermin dalam

adanya inflasi yang tinggi atau inflasi yang tidak terkendali lebih cenderung berakibat buruk terhadap kelangsungan produksi karena kenaikan harga-harga barang output juga akan menimbulkan efek *multiplier* terhadap kenaikan ongkos produksi termasuk barang-barang input yang dibutuhkan dalam memproduksi barang. Inflasi memang diperlukan untuk menggairahkan perekonomian, namun inflasi yang cukup tinggi juga dapat membawa dampak buruk terhadap perekonomian.

Lain halnya dengan variabel investasi fisik yang tidak berpengaruh signifikan, hal ini disebabkan karena investasi yang terjadi adalah yang padat modal (*capital intensive*) bukan yang padat tenaga kerja (*labor intensive*).

SIMPULAN

1. Pada persamaan struktural penyerapan tenaga kerja, variabel tingkat upah riil, PDB, investasi fisik, dan perubahan harga secara serempak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Pada persamaan struktural tenaga kerja, variabel tingkat upah riil, PDB dan perubahan harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel investasi fisik tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Pada persamaan struktural tingkat upah riil, variabel penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan tingkat pendidikan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah riil di Indonesia.
4. Pada persamaan struktural tingkat upah riil, variabel penyerapan tenaga kerja dan upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat upah riil di Indonesia, sedangkan variabel tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat upah riil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris. 1990. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. 2006. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kep. Bangka Belitung Triwulan II 2006*. Available from: <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1DBECA27-4631-4596-B25C-98D419D8353A/10085/Boks1.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2012.
- Dimas dan Neni Woyanti. 2009. *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2009, Vol. 16, No. 1, Hal. 32-41. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Simanjuntak, Payaman. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Sitanggang, R. Ignatia, dan Djalal N. Nachrowi. 2004. *Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektor: Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi pada 9 sektor di Indonesia*. Jurnal Pembangunan, Juli Vol. 5, No 103-133. Jakarta: FEUI.
- SMERU. 2001. *Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia*. Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU. Available from: www.smeru.or.id/report/resach/minimumwageexumind.pdf.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Edisi 1, Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wicaksono, Rezal. 2010. Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.